

Daftar Pustaka

Buku

- A'an Effendi. Freddy Poernomo. 2019. *Hukum Administrasi Negara Sinar Grafika*. Jakarta.
- Abdurrahman Fatoni. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Aminuddin Ilmar, 2013 , *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas, Makassar.
- A.M Yunus Wahid.2014.*Pengantar Hukum Tata Ruang*. Makassar:Kencana Prenadamedia Group Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achkadi. 2015. *Metodoligi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dewa Jufri. 2011. *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari.
- Fajlurrahman Jurdi. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rangkang Education. Yogyakarta.
- Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin. 2020. *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Sinar Garfika. Jakarta Timur.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Yuridika. Jakarta
- Irwansyah. Editor. Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Penulisan Atikel*. Edisi Ketiga. Mitra Buana Media, Yogyakarta
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metedologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media. Surabaya.
- Nandang Alamsah. Soni Akhmad Nulhaqim. et.all. 2004. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Unpad Press. Bandung.

- Rahmawati Sururama. Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. Cendekia Press. Bandung
- Rimbawani Vera. 2020. *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Ubhara Press, Surabaya.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Suryanti, Supriharyono,/ Sutrinso Anggoro, 2019, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, Undip Press, Semarang.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriharyono. 2009. *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati dan Wilayah Pesisir dan Laut Tropis* (Cetakan Pertama, Edisi Kedua), Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tjandra Riawan, 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika Jakarta.
- Yusri Munaf, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing. Pekanbaru.

Jurnal

- Adi Waluyo, (2014), *Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu Yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pulau Raas Kabupaten Sumenep Madura)*, Jurnal Kelautan Vol. 7, No. 2.
- Arini Nur Annisa, Mutiah Wenda Juniar, Rismawati Nur, Muh Ramadhansyah Prasetya, (2022), "Government Supervision of The Rights Fulfillment of Housed Workers in The Transition Period", Awang Long Law Review , Vol.5 No. 1.
- Ivan Fauzi Raharja. (2014). *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan*. Inovatif Vol. 7 No. 2

- Joshua Melvin, SriSusyantiNur, KaharLahae. *Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan*. Mulawarman Law Review. Vol 6 Issue 1
- Mohammad Mahrus Ali, Zaka Firma Aditya, et. All, (2020), *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No 4.
- Rifqy Maulana, *Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan*, Jurnal Ilmu Hukum PerundangUndangan dan Pranata Sosial, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 3 Nomor 1 2018, hlm. 90.
- Ricky Martin Wattimena, (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Pada Areal Peisir Pantai*, Balobe Law Jurnal, Vol. 1 No 2.
- Sri Nur Hari Susanto. (2019). *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: suatu pendekatan komparasi*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Vol. 2 No. 1.
- Zulkifli Aspan, Ariani Arifin, Anshori Ilyas, Ahsan Yunus. *Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negar*. Al-Azhar Islamic Law Review. Vol 1 No 1 Januari 2019

Skripsi

- Rahmat, 2018 *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- St. Nadiyah Hudjaemah Parawansa, 2017, *Status Hak Atas Tanah Di Atas Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau
Kecil;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016
Tentang Batas Sempadan Pantai

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020
Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau
Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039;

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang
Tahun 2022-2041

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 49 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Dan Tata Ruang

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0563/PENELITIAN/DPMPPTSP/08/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 11-08-2023 atas nama MUH. RIZAL, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0969/R/T.Teknis/DPMPPTSP/08/2023, Tanggal : 11-08-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0564/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/08/2023, Tanggal : 11-08-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
 - 2. Alamat Lembaga : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR
 - 3. Nama Peneliti : MUH. RIZAL
 - 4. Judul Penelitian : PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TERHADAP PENATAAN RUANG DI WILAYAH PESISIR
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : KEPALA DINAS ATAU PEJABAT DINAS TATA RUANG
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Paletang
- KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-02-2024.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 16 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**